

Jurnal Mutiara Akuntansi, 17/10/2017 (Hal: 83-94)

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH

(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2016)

Benny Rojeston Marnaek Nainggolan
Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia
Email : benny.bppk@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara Tahun 2014-2016. Sampel dalam penelitian ini 33 Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan metode *purposive sampling*. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan uji t, uji F dan koefisien determinasi. Hasil pengujian secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sementara itu Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Secara Simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara tahun 2014-2016.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

ABSTRACT

This study examines the effect of the Economic Growth, Local Own Revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU) and Specific Allocation Fund (DAK) on the Capital Expenditure districts and cities in North Sumatra with year of research 2014-2016. The sample used in this study were 33 districts and cities in North Sumatra with purposive sampling methods. Analysis tool used in this study is multiple linear regression with a t test, f test and test the coefficient of determination. The results of this study indicate that partial Local Own Revenue (PAD) and the Specific Allocation Fund (DAK) have significant effect on the Capital Expenditure, meanwhile Economic Growth and General Allocation Fund (DAU) had no significant effect on the Capital Expenditure. Simultaneously Economic Growth, Local Own Revenue, General Allocation Fund and Specific Allocation Fund significant effect on the Capital Expenditure district and cities in North Sumatra.

Keywords : Growth Economic, Local Owner Revenue, General Allocation Fund, Specific Allocation Fund and Capital Expenditure

1. Pendahuluan

Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat. Kewenangan yang luas ini juga diberikan dalam hal pengelolaan keuangan, dengan pengelolaan keuangan sendiri pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah tersebut.

Otonomi daerah juga memisahkan fungsi antara fungsi Pemerintah Daerah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif), dimana didalam melakukan proses penyusunan anggaran masing-masing memiliki kewenangannya sendiri. Perbedaan fungsi tersebut menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Halim, 2006).

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama didalam memperoleh PAD, sementara itu keuangan daerah sangat dibutuhkan dalam mendanai kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini maka Pemerintah Pusat mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dimana didalam pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal didaerahnya.

Pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat disertai juga dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Pengalihan dana dimaksud adalah dalam bentuk dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan ke daerah tertentu untuk

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK diarahkan untuk kegiatan pembangunan, peningkatan, perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana fisik. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Salah satu tujuan penting pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang baik akan meningkatkan produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah.

Sementara itu belanja modal sendiri adalah bentuk investasi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Belanja modal akan memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian di daerah, dengan semakin besar alokasi belanja modal pada pemerintah daerah maka makin menggerakkan ekonomi daerah. Pengusaha yang mendapatkan proyek-proyek pemerintah yang dialokasikan melalui belanja modal akan mempekerjakan banyak tenaga kerja yang berdampak penyerapan tenaga kerja, proyek-proyek tersebut akan membutuhkan material dan bahan-bahan bangunan sehingga penyedia bahan material mendapat pemesanan yang besar serta keuntungan dari pengusaha tersebut akan meningkatkan sektor perpajakan, baik pajak pusat maupun daerah.

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi bukan merupakan gambaran ekonomi tetapi suatu proses untuk melihat perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu (Boediono 2009).

Menurut Sukirno (2000) pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Menurut penelitian Darwanto (2007) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan. Faktor-faktor itu antara lain sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan.

Pada penelitian sebelumnya Mayasari, Sinarwati dan Yuniarta (2014) terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal.

Berdasarkan landasan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan otonomi daerah mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dan menurut penelitian terdahulu juga terdapat pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian belanja modal. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

2.2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sjafrizal (2012) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dapat dipungut sendiri dan dimanfaatkan oleh

pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 157 dijelaskan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan ekonomi. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal (Halim, 2014).

Arwati dan Hadiati (2013) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.

2.3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Halim (2014) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana yang bersifat "*block grant*", sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. DAU dialokasikan kepada setiap daerah berdasarkan formulasi alokasi. Sesuai dengan formula tersebut setiap daerah akan menerima DAU sesuai dengan kondisi kesenjangan keuangan.

Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Menurut penelitian Permana dan Rahardjo (2013) terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Belanja Modal, begitu juga dengan penelitian Mayasari, Sinarwati dan Yuniarta (2014) juga terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Belanja Modal. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.

2.4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan usulan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan (pelayanan dasar dan pelayanan rujukan), jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana perdesaan, serta perdagangan.

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

Menurut Permana dan Rahardjo (2013) terdapat pengaruh positif Dana Alokasi Khusus terhadap pengalokasian Belanja Modal. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.

2.5. Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

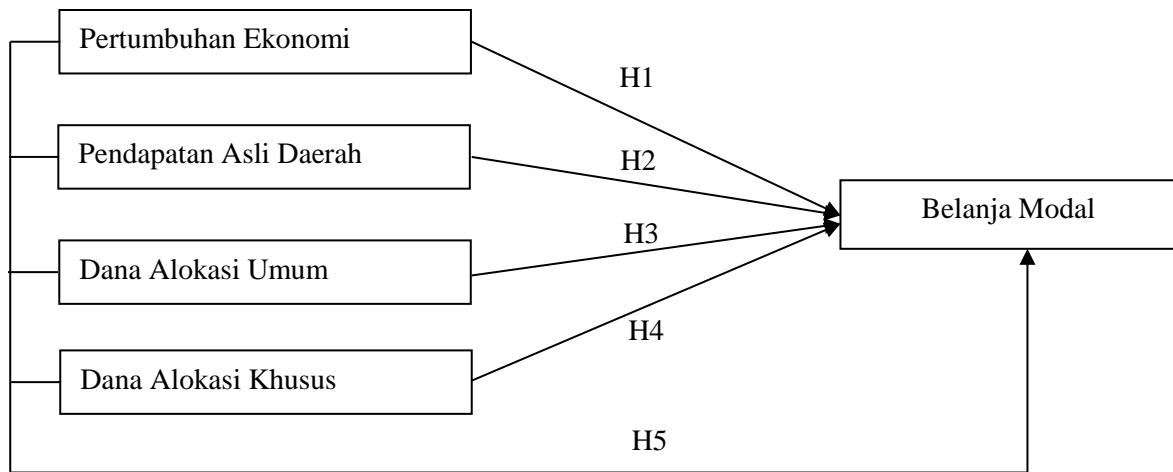
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Belanja modal adalah belanja barang/jasa yang dianggarkan pada pengeluaran APBD yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan (Badrudin 2017).

Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

- 1) Belanja Modal Tanah;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- 4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- 5) Belanja Modal Fisik Lainnya.

Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian

3.1. Populasi dan Sampel

Siregar (2012) menyatakan populasi adalah serumpun/sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2014 - 2016. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 33 Kabupaten/Kota.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2016). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah berdasarkan *purposive sampling* yaitu cara pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atau kriteria tertentu, dimana dalam penelitian ini kriterianya adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota yang melampirkan laporan keuangannya secara lengkap selama tahun penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut, maka populasi penelitian yang

berjumlah 33 Kabupaten dan Kota diseleksi, sehingga jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah 32 Kabupaten dan Kota. Dengan begitu jumlah observasinya adalah 96.

Data yang dianalisis adalah data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran APBD, data dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

3.2. Metode Analisis Data

Analisis statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan uji normalitas data, multikolinieritas, heterokedasitas, dan autokorelasi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji koefisien determinasi (R^2), uji secara simultan (uji F) dan uji secara parsial (uji T).

4. Hasil dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PE	96	4,11	7,67	5,3342	,58198
PAD	96	10.961.907.851,32	1.535.308.974.014,91	120.265.379.904,6857	258.102.198.326,72464
DAU	96	250.589.805.000,00	1.611.940.995.000,00	617.143.084.172,5104	282.935.501.173,70000
DAK	96	25.520.490.000,00	408.339.324.652,00	106.814.668.362,4896	74.801.992.087,31403
BM	96	45.065.315.457,50	936.599.131.961,06	246.277.422.364,8471	162.875.841.335,29530

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23

Tabel statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara adalah 5,33% dengan pertumbuhan terendah 4,11% dan pertumbuhan tertinggi 7,67%. Untuk Pendapatan Asli Daerah nilai rata-ratanya adalah Rp 120.265.379.904,68 dengan pendapatan terendah Rp10.961.907.851,32 dan tertinggi Rp 1.535.308.974.014,91. Dana Alokasi Umum nilai rata-ratanya Rp617.143.084.172,51 dengan nilai tertinggi Rp1.611.950.995.000 dan nilai terendah Rp250.589.805.000. Dana Alokasi Khusus nilai rata-ratanya Rp106.814.668.362,48 dengan nilai tertinggi Rp408.339.324.652 dan nilai terendah Rp25.520.490.000. Rata-rata untuk Belanja

Modal Rp246.277.422.364,84 dengan nilai alokasi belanja modal tertinggi Rp936.599.131.961,06 dan terendah Rp45.065.315.457,50.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dalam uji normalitas yang dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Sminov* dengan cara *unstandardized residual* nilai *asym sig (2-tailed)* lebih kecil dari alpha 0,05 yang berarti semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Kolmogorv-Smirnov Sebelum Transformasi Data

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Test Statistic</i>	0,144
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,000

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPPS 23

Setelah dilakukan transformasi data dan kemudian dilakukan kembali uji *Kolmogorov-Smirnov* nilai *asymptotic* (*2-tailed*) lebih besar dari 0,05 yang berarti variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Tabel 3. Uji Pengujian *Kolmogorov-Smirnov* Setelah Transformasi Data

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Test Statistic</i>	0,088
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,064

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23

Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 4. Hasil Pengujian Multikolinearitas

	Sqrt_PE	Sqrt_PAD	Sqrt_DAU	Sqrt_DAK
Tolerance	0,897	0,369	0,333	0,753
VIF	1,115	2,710	2,999	1,328

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23

Dari Tabel 4 di atas nilai *tolerance* semua variabel independen lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di bawah 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas semua variabel independen memiliki nilai *sig* di atas 0,05 yang berarti masing-masing variabel tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

	Sqrt_PE	Sqrt_PAD	Sqrt_DAU	Sqrt_DAK
Sig	0,767	0,349	0,352	0,433

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23

Uji Autokorelasi

Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini

Tabel 6. Hasil Pengujian Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,776	0,602	0,584	86211,01444	1,600

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23

Dari tabel di atas, nilai *Durbin-Watson* (DW) yang dihasilkan adalah 1,600. Hasil yang diperoleh dalam tabel DW menunjukkan hasil $1,579 < 1,600 < 2,245$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang akan dibentuk tidak terdeteksi gejala autokorelasi.

Model Penelitian

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Pengujian Persamaan Regresi

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	30644,273	182077,268		,168	,867
SQRT_PE	80103,521	74627,003	,075	1,073	,286
SQRT_PAD	,424	,074	,627	5,761	,000
SQRT_DAU	,104	,095	,126	1,095	,276
SQRT_DAK	,198	,099	,152	1,996	,049

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 23

Persamaan regresi sesuai dengan hasil pengujian persamaan regresi dalam tabel di atas adalah :
 $Sqrt_BM = 30.644,27 + 80.103,52 Sqrt_PE + 0,42 Sqrt_PAD + 0,10 Sqrt_DAU + 0,19 Sqrt_DAK + e$

Keterangan:

- BM = Belanja Modal
- PE = Pertumbuhan Ekonomi
- PAD = Pendapatan Asli Daerah
- DAU = Dana Alokasi Umum
- DAK = Dana Alokasi Khusus
- e = error

Pengujian Hipotesis

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	30644,273	182077,268		0,168	0,867
SQRT_PE	80103,521	74627,003	0,075	1,073	0,286
SQRT_PAD	0,424	0,074	0,627	5,761	0,000
SQRT_DAU	0,104	0,095	0,126	1,095	0,276
SQRT_DAK	0,198	0,099	0,152	1,996	0,049
R Square					0,602
Adj R Square					0,584
F					34,369
Sig					0,000

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil pengujian dalam tabel 8 tersebut, besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal sebesar 58,4% sisanya sebesar 41,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Uji Simultan (Uji F)

Nilai F_{hitung} dalam penelitian ini adalah sebesar 34,369 dengan sig 0,000, dimana F_{tabel} adalah 2,47, maka $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai sig 0,000 < 0,05 yang berarti variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal. Nilai sig 0,000 < 0,05 yang berarti berpengaruh signifikan. Kesimpulannya pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Uji Parsial (uji t)

Berdasarkan tabel 8 di atas untuk hasil pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Hasil t_{hitung} adalah 1,073 sedangkan t_{tabel} adalah 1,986 yang artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai sig 0,286 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Permana dan Rahardjo (2013) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi anggaran belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Hasil t_{hitung} adalah 5,761 sedangkan t_{tabel} adalah 1,986 yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig 0,00 < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Arwati dan Hadiati (2013) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial dari pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Hasil t_{hitung} adalah 1,095 sedangkan t_{tabel} adalah 1,986 yang artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai sig 0,276 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum secara parsial tidak berpengaruh

terhadap belanja modal. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Arwati dan Hadiati (2013) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa dana alokasi umum yang selama ini diterima oleh daerah tidak digunakan untuk pembangunan daerah yang terlihat dalam alokasi belanja modalnya. Hasil ini memberikan gambaran bahwa selama ini dana alokasi umum banyak digunakan untuk memenuhi belanja operasional dari pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Hasil t_{hitung} adalah 1,996 sedangkan t_{tabel} adalah 1,986 yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig $0,049 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menjelaskan bahwa dana alokasi khusus digunakan memang diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas nasional yang menambah alokasi belanja modal daerah.

SIMPULAN

Simpulan

Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.
2. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.
3. Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.
4. Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.

Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan yaitu terdapat perbedaan yang besar pada beberapa data karena berasal dari pengamatan wilayah yang berbeda serta jangka waktu penelitian yang hanya 3 tahun pengamatan.

Saran

Berdasarkan keterbatasan dari hasil penelitian ini, maka saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan permasalahan serupa, disarankan agar penelitian dilakukan pada objek yang lebih luas dan sampel dari Kabupaten dan Kota diluar Sumatera Utara dan menambahkan tahun pengamatan pada penelitian yang akan datang. Variabel yang akan digunakan sebaiknya menambah aspek kebijakan publik, aspek politik dan aspek penganggaran daerah.
2. Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
Studi ini dapat dijadikan masukan dalam mengambil kebijakan penganggaran dan kebijakan pengelolaan manajemen keuangan daerah agar menggunakan alokasi dana dari pusat untuk menambah alokasi belanja modal, bukan sebaliknya memperbesar belanja operasional atau belanja rutin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwati & Hadiati. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan*.
- Badrudin, R. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah* (edisi kedua). Yogyakarta. Penerbit UPP STIM YKPN.

- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. 2017. *PDRB Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. Bandung
- Boediono. 2009. *Teori Pertumbuhan Ekonomi* (edisi ketujuh). Yogyakarta. Penerbit BPF.
- Darwanto & Yustikasari. 2006. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, "Data Series Keuangan Daerah". www.djpk.go.id
- Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (edisi ketujuh). Semarang. Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik* (edisi pertama). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mayasari, Sinarwati & Yuniarta. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *E-Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha 2* (1).
- Permana & Rahadjo. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting 2* (4): 1-10.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sjafrizal. 2017. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan* (edisi pertama). Jakarta. Penerbit Rajawali Press.
- Siregar, S. 2012. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara.
- Soekirno, S. 2010. *Makroekonomi Teori Pengantar* (edisi ketiga). Jakarta. Penerbit Rajawali Press.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (edisi pertama). Bandung. Penerbit Alfabeta.
- UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.